



PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA DENPASAR

Intan Tiarani Koli

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
E-mail: intankoli77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi program bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Denpasar, yang merupakan isu penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Meskipun program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah memberikan dampak positif, masih terdapat kekurangan pemahaman khusus tentang efektivitas dan pengaruh program dari perspektif penerima manfaat di Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi program tersebut berkontribusi menurunkan kemiskinan serta mengevaluasi efektivitas dan komponen kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial. Metode kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur kepada 100 responden penerima bantuan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat dampak positif, banyak masyarakat masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan memandang layanan serta prosedur pemerintah masih perlu perbaikan. Kesimpulan menegaskan bahwa program bantuan sosial berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan, namun perbaikan dalam sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk mencegah ketergantungan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin di Denpasar.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Implementasi Program Sosial, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

This study examines the influence of social assistance program implementation on poverty levels in Denpasar City, addressing the critical issue that poverty requires not only temporary aid but sustainable economic resilience for poor households. Recognizing that while social assistance such as Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), and Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) have improved welfare, there remains a gap in understanding the specific effectiveness and impacts of these programs from the beneficiaries' perspective in Denpasar. The research aims to analyze the extent to which program implementation reduces poverty, evaluates program effectiveness, and identifies key policy components that enhance social welfare. Employing a quantitative approach, data were collected through structured questionnaires from 100 diverse respondents receiving social assistance. Analysis using descriptive statistics and linear regression indicates that despite positive



impacts, significant economic challenges persist, with many respondents still struggling to meet basic needs and reporting neutral perceptions on government service quality and procedural clarity. The study concludes that while social assistance programs positively influence poverty reduction, improvements are necessary in program outreach, communication, and ongoing evaluation to prevent dependency and strengthen economic independence. Recommendations include enhanced socialization of program procedures, simplification of aid distribution, and continuous monitoring to maximize long-term welfare outcomes for poor communities in Denpasar.

Keywords: Social Assistance, Poverty Rate, Social Program Implementation

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang secara konsisten menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, serta aspek spasial dan temporal. Di negara berkembang seperti Indonesia, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lahan, dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan layak. Amartya Sen (1999), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang layak secara sosial, bukan hanya sebagai kekurangan dalam hal pendapatan atau barang materi. Menurutnya, kemiskinan lebih dari sekadar kekurangan fisik; yakni mencakup ketidakmampuan individu untuk berfungsi dengan baik dalam masyarakat, yaitu kehilangan kemampuan untuk mengakses kesempatan yang ada dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Sedangkan Menurut Schiller (1979) kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memperoleh barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemiskinan dikelompokkan dalam berbagai bidang antara lain: ekonomi, sosial, politik (Kamalfuadi, 2009).

Sebagai ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa. Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar Kota Hidup”. Namun, tentunya dihadapkan juga dengan tantangan kemiskinan.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kemiskinan di Kota Denpasar

Denpasar – Bali	Jumlah Penduduk Miskin Kota Denpasar (Ribuan Jiwa)				
Kota Denpasar	2020	2021	2022	2023	2024
	20,48	29,41	30,02	27,69	27,27

Berdasarkan dari sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) dari jumlah (Ribuan) jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama periode 5 Tahun terakhir. Dari 2020 hingga 2024, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 20,48 ribu jiwa, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 29,41 ribu jiwa pada tahun 2021, dan



sedikit naik lagi pada tahun 2022 menjadi 30,02 ribu jiwa. Namun, sejak tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 27,69 ribu jiwa dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi 27,27 ribu jiwa. Dari tahun 2024-2024 penurunan kemiskinan Kota Denpasar perlu adanya evaluasi lagi terkait dengan implementasi Program-program bantuan sosial Kota Denpasar.

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan perlu adanya sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengingat kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan Langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diimplementasikan untuk memberikan perlindungan sosial serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga semestinya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas suatu program bansos tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana bantuan tersebut mampu memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga miskin dan menghindarkan mereka dari ketergantungan jangka panjang.

Pada tahun 2024, tahap pertama yang menyasar 76.665 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Denpasar, Namun, efektivitas dan dampak dari program-program tersebut sering kali menjadi bahan evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Miracantika dan Wirantari (2024) menemukan bahwa program bantuan sosial di Kota Denpasar telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan fakir miskin, namun masih ada tantangan dalam hal penyaluran dan sosialisasi program. Penelitian lain oleh Salsabila et al. (2024) menyoroti bahwa meskipun program bantuan sosial memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, terdapat kebutuhan mendesak untuk evaluasi berkala guna memastikan manfaat yang berkelanjutan dan menghindari ketergantungan. Pada penelitian sebelumnya banyak membahas dampak program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, namun masih sedikit yang secara spesifik menyoroti efektivitas dan pengaruh implementasi bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Denpasar, khususnya dari perspektif penerima manfaat.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan di Kota Denpasar memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mampu membangun ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar bantuan yang disalurkan, melainkan dari kemampuan program tersebut dalam menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Dalam konteks

tersebut, penting untuk dikaji apakah implementasi program bantuan sosial pemerintah benar-benar memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Denpasar, serta sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat miskin tanpa menimbulkan rasa ketergantungan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi program bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan, menilai efektivitas program dari sudut pandang penerima manfaat, serta mengidentifikasi komponen kebijakan bantuan sosial yang paling berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat miskin secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif karena berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengukur hubungan antara variabel implementasi program bantuan sosial dan tingkat kemiskinan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert, yang memungkinkan pengukuran persepsi responden secara objektif dan terstruktur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, seperti statistik deskriptif dan regresi linier, bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh program bantuan sosial terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan sosial yang tinggal di Kota Denpasar, khususnya mereka yang menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penelitian ini juga melibatkan instansi terkait seperti Bappeda Kota Denpasar bidang 2 dan Dinas Sosial, BPS Kota Denpasar. Selain itu sebagai sumber data pendukung. Responden dalam penelitian ini dipilih dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan jenis pekerjaan, yang diukur melalui kuesioner terstruktur untuk menggambarkan efektivitas program bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H1: Implementasi program bantuan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Denpasar.

H2: Implementasi program bantuan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Denpasar.

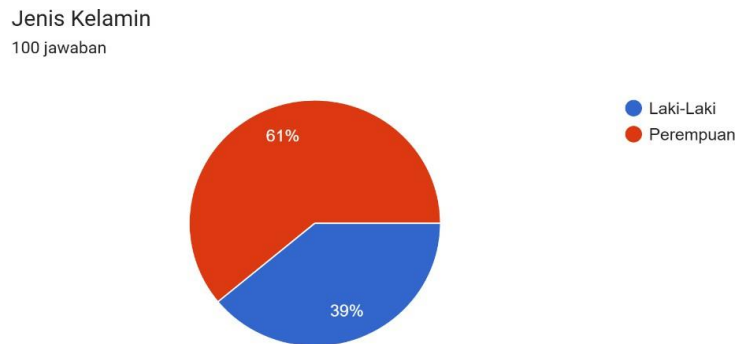
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian diambil berdasarkan penyebaran kuesioner kepada 100 responden di Kota Denpasar yang berfokus pada status mereka sebagai penerima program bantuan sosial

yang terdaftar di Kota Denpasar. Data yang dikumpulkan meliputi faktor demografis seperti jenis kelamin dan usia, serta tanggapan terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi dan persepsi masyarakat terkait program bantuan sosial di wilayah Denpasar.

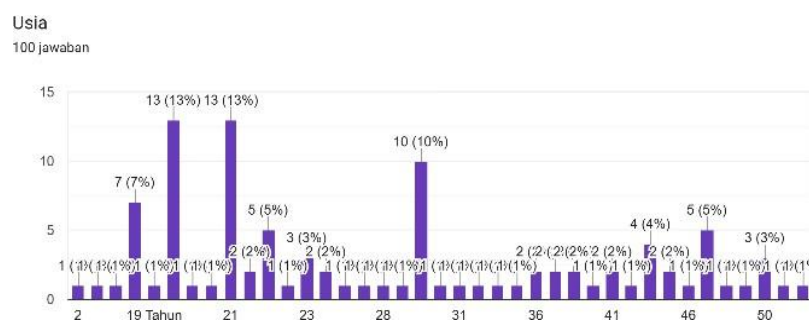
1. Karakteristik Jenis Kelamin



Gambar 1. Persentase Responden Laki-laki dan Perempuan
Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Berdasarkan data hasil kuesioner dari 100 responden, diketahui bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 61%, sementara laki-laki berjumlah 39%. Komposisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam penelitian ini. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa perempuan, sebagai bagian dari kelompok rumah tangga penerima manfaat, memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap program bantuan sosial atau lebih aktif dalam menyampaikan persepsi mereka terhadap implementasi program tersebut. Dengan demikian, sudut pandang perempuan menjadi dominan dan memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas bantuan sosial di Kota Denpasar dari sisi penerima manfaat.

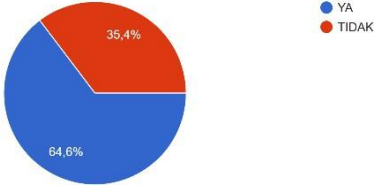
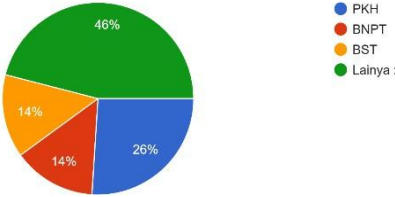
2. Karakteristik Usia



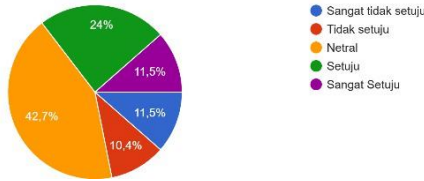
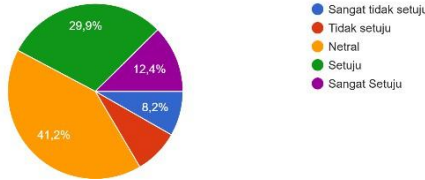
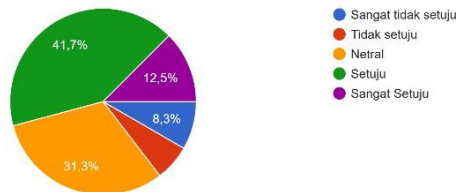
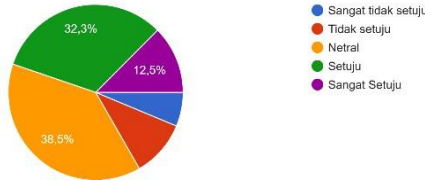
Gambar 2. Persentase Rentang Usia Responden
Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

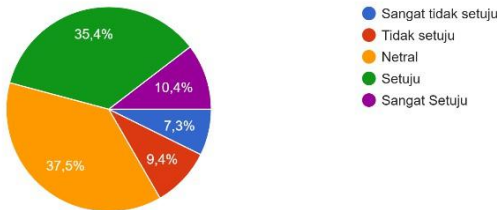
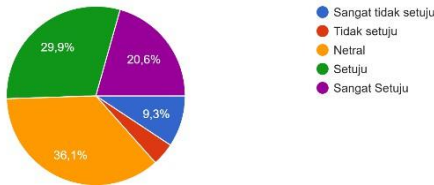
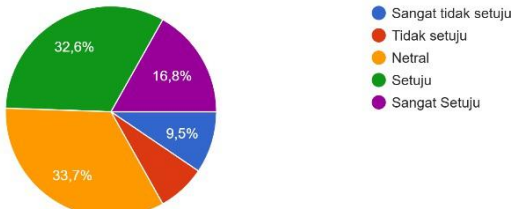
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari usia 2 hingga 50 tahun. Namun, usia yang paling dominan adalah 19 dan 21 tahun, masing-masing sebanyak 13 responden. Selain itu, jumlah responden terbanyak berikutnya berada pada usia 28 dan 31 tahun, yang masing-masing mencapai 10% dari total responden. Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden merupakan individu dalam usia produktif awal hingga menengah, yang umumnya lebih responsif terhadap program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah.

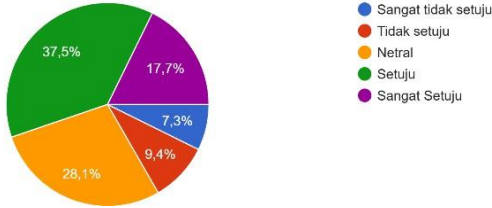
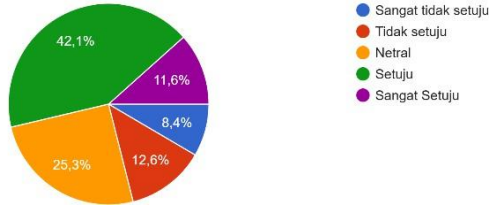
Tabel 2. Pernyataan Kusioner Penelitian

No	Pernyataan/Pertanyaan Kuisisioner	Hasil dan Analisis
1	Apakah Anda penerima bantuan sosial dari pemerintah? 99 jawaban  Legend: ● YA (Blue), ● TIDAK (Red)	Berdasarkan hasil survei terhadap 99 responden, mayoritas mengaku pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, yakni sebanyak 64,6%. Sementara itu, sisanya 35,4% menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut. Persentase ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah menjangkau sebagian besar masyarakat, khususnya di Kota Denpasar.
2	Jika ya, sebutkan jenis bantuan sosial yang pernah diterima ? 100 jawaban  Legend: ● PKH (Blue), ● BNPT (Orange), ● BST (Orange), ● Lainnya : (Green)	Berdasarkan data, jenis bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah kategori “lainnya” sebesar 46%, disusul PKH 26%, sementara BPNT dan BST masing- masing 14%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menerima bantuan dari berbagai program di luar skema utama pemerintah.



No	Pernyataan/Pertanyaan Kuisisioner	Hasil dan Analisis
3	Implementasi Program Bantuan Sosial : Saya menerima bantuan sosial secara rutin sesuai jadwal 96 jawaban  ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	Mayoritas responden (42,7%) merasa tidak menerima bantuan sosial secara rutin sesuai jadwal, sementara hanya 24% yang menyatakan setuju dan 11,5% sangat setuju, menunjukkan masih adanya ketidakteraturan dalam penyaluran bantuan.
4	Bantuan sosial yang saya terima sesuai dengan kebutuhan saya 97 jawaban  ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	Sebagian besar responden (41,2%) bersikap netral terhadap kesesuaian bantuan sosial dengan kebutuhan mereka, sementara 29,9% merasa sesuai dan hanya sedikit yang sangat tidak setuju (8,2%).
5	Informasi mengenai bantuan sosial mudah diakses 96 jawaban  ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	Berdasarkan hasil survei dari 96 responden, sebanyak 41,7% menyatakan setuju bahwa informasi mengenai bantuan sosial mudah diakses, dan 12,5% sangat setuju. Sementara itu, 31,3% responden bersikap netral, 8,3% tidak setuju, dan 6,2% sangat tidak setuju.
6	Petugas dari instansi pemerintah memberikan layanan dengan baik 96 jawaban  ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	Berdasarkan survei terhadap 96 responden mengenai kualitas layanan petugas pemerintah, mayoritas responden bersikap netral (38,5%), diikuti oleh mereka yang setuju (32,3%), menunjukkan bahwa pandangan publik terhadap layanan pemerintah cukup beragam, dengan persentase signifikan yang tidak sepenuhnya setuju maupun tidak setuju.

No	Pernyataan/Pertanyaan Kuisisioner	Hasil dan Analisis										
7	Prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial cukup jelas dan tidak rumit 96 jawaban  <table><tr><td>Sangat tidak setuju</td><td>7,3%</td></tr><tr><td>Tidak setuju</td><td>9,4%</td></tr><tr><td>Netral</td><td>37,5%</td></tr><tr><td>Setuju</td><td>35,4%</td></tr><tr><td>Sangat Setuju</td><td>10,4%</td></tr></table>	Sangat tidak setuju	7,3%	Tidak setuju	9,4%	Netral	37,5%	Setuju	35,4%	Sangat Setuju	10,4%	Dalam survei terhadap 96 responden, persepsi terhadap layanan pemerintah dan prosedur bantuan sosial menunjukkan hasil yang beragam. Untuk layanan petugas, 38,5% responden bersikap netral dan 32,3% setuju, mengindikasikan adanya ruang perbaikan. Sementara itu, 45,8% responden (setuju dan sangat setuju) menilai prosedur bantuan sosial cukup jelas, meskipun 37,5% tetap netral dan 16,7% tidak setuju, menunjukkan bahwa upaya penyederhanaan dan sosialisasi prosedur masih relevan.
Sangat tidak setuju	7,3%											
Tidak setuju	9,4%											
Netral	37,5%											
Setuju	35,4%											
Sangat Setuju	10,4%											
8	Tingkat Kemiskinan (Persepsi Dampak Sosial-Ekonomi) Saya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 97 jawaban  <table><tr><td>Sangat tidak setuju</td><td>9,3%</td></tr><tr><td>Tidak setuju</td><td>4,1%</td></tr><tr><td>Netral</td><td>36,1%</td></tr><tr><td>Setuju</td><td>29,9%</td></tr><tr><td>Sangat Setuju</td><td>20,6%</td></tr></table>	Sangat tidak setuju	9,3%	Tidak setuju	4,1%	Netral	36,1%	Setuju	29,9%	Sangat Setuju	20,6%	Dari tiga survei, 38,1% responden kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Mengenai layanan pemerintah, 38,5% netral, sedangkan untuk prosedur bantuan sosial, 45,8% menganggapnya jelas. Ini menyoroti tantangan ekonomi dan kebutuhan peningkatan layanan serta kejelasan prosedur pemerintah.
Sangat tidak setuju	9,3%											
Tidak setuju	4,1%											
Netral	36,1%											
Setuju	29,9%											
Sangat Setuju	20,6%											
9	Penghasilan saya tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga saya 95 jawaban  <table><tr><td>Sangat tidak setuju</td><td>9,5%</td></tr><tr><td>Tidak setuju</td><td>7,4%</td></tr><tr><td>Netral</td><td>33,7%</td></tr><tr><td>Setuju</td><td>32,6%</td></tr><tr><td>Sangat Setuju</td><td>16,8%</td></tr></table>	Sangat tidak setuju	9,5%	Tidak setuju	7,4%	Netral	33,7%	Setuju	32,6%	Sangat Setuju	16,8%	Hasil survei menunjukkan tantangan ekonomi yang signifikan, dengan 38,1% responden kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan 33,7% merasa penghasilan tidak mencukupi. Terkait layanan publik, 38,5% netral terhadap
Sangat tidak setuju	9,5%											
Tidak setuju	7,4%											
Netral	33,7%											
Setuju	32,6%											
Sangat Setuju	16,8%											

No	Pernyataan/Pertanyaan Kuisisioner	Hasil dan Analisis
		layanan petugas pemerintah. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan intervensi ekonomi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan serta transparansi prosedur pemerintah.
10	Saya kesulitan mengakses layanan kesehatan karena faktor ekonomi 96 jawaban  ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	Warga masih berjuang ekonomi, dengan 38,1% kesulitan kebutuhan pokok dan 33,7% merasa penghasilan tak cukup, bahkan 37,5% sulit akses kesehatan karena biaya. Layanan pemerintah diterima beragam (38,5% netral), sementara prosedur bansos dinilai cukup jelas (35,4% setuju). Ini menunjukkan desakan atasi masalah ekonomi dan tingkatkan layanan publik.
11	Saya tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil 95 jawaban  ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	38,1% kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, 33,7% merasa penghasilan tak cukup, 37,5% sulit akses kesehatan karena ekonomi, dan 42,1% tidak memiliki. pekerjaan/penghasilan stabil. Layanan petugas pemerintah diterima netral oleh 38,5%, dan prosedur bantuan sosial dianggap jelas oleh 35,4%. Ini menunjukkan tekanan ekonomi signifikan pada masyarakat, dengan kebutuhan akan peningkatan layanan dan kejelasan prosedur pemerintah.

No	Pernyataan/Pertanyaan Kuisisioner	Hasil dan Analisis
12	Harga barang dan kebutuhan pokok semakin memberatkan kondisi ekonomi saya 96 jawaban ● Sangat tidak setuju ● Tidak setuju ● Netral ● Setuju ● Sangat Setuju	Harga barang memberatkan bagi 57,3% responden, 38,1% kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, 33,7% merasa penghasilan tak cukup, 37,5% sulit akses kesehatan, dan 42,1% tak punya pekerjaan/penghasilan stabil. Layanan petugas pemerintah diterima netral oleh 38,5%, sementara prosedur bantuan sosial dianggap jelas oleh 45,8%. Ini menyoroti tekanan ekonomi signifikan dan perlunya peningkatan pada layanan publik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, dengan lokusnya di Kota Denpasar dapat dilihat bahwa meskipun mayoritas masyarakat telah menerima bantuan sosial, masih terdapat tantangan dalam hal pengaruh dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Dalam pembahasan ini akan menghubungkan dua variabel utama, yaitu implementasi program bantuan sosial dan tingkat kemiskinan, serta mengkaji sejauh mana bantuan tersebut benar-benar membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

1. Implementasi Program Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 64,6% respon dari masyarakat menerima bantuan sosial dari pemerintah. Namun, meskipun hal ini telah lebih dominan dirasakan mayoritas masyarakat, kenyataannya penggunaannya belum sepenuhnya efektif. Dari hasil data penyebaran kuisisioner maka terhitung Sebanyak 42,7% responden merasa bahwa bantuan sosial tidak diterima secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam hal penyaluran bantuan yang dapat mengurangi dampak positifnya bagi masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Selain itu, sekitar 46% responden menerima jenis bantuan yang tercatat dalam kategori “lainnya”, yang menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan berasal dari program di luar skema utama yang diteliti seperti PKH atau BPNT. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok masyarakat.

2. Tingkat Kemiskinan dan Dampak Bantuan Sosial

Dalam hal kemiskinan, hasil survei menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah menerima bantuan sosial, mereka masih menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Sebanyak 38,1% responden mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan 33,7% merasa bahwa penghasilan mereka tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut, 42,1% responden tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, yang menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial diberikan, hal ini belum berhasil memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, hubungan antara pelaksanaan program bantuan sosial dan tingkat kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknis semata, seperti siapa yang menerima bantuan atau jenis bantuan apa yang diberikan. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana bantuan tersebut benar-benar mampu membantu masyarakat keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Sebuah program yang dirancang dengan baik, tetapi tidak tepat sasaran atau tidak disalurkan secara konsisten, tentu tidak akan memberi dampak besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat miskin. Sebaliknya, jika bantuan sosial dijalankan dengan kualitas yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan, maka bantuan tersebut tidak hanya menjadi penolong sementara, tetapi bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Denpasar, program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah telah menjangkau sebagian besar masyarakat miskin, dengan 64,6% responden mengaku pernah menerima bantuan. Bantuan tersebut berasal dari berbagai program, termasuk PKH, BPNT, dan BST, serta kategori lainnya. Meskipun demikian, penyaluran bantuan masih mengalami ketidakteraturan dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, akses informasi bantuan sosial dinilai cukup terbuka, namun kualitas layanan petugas pemerintah dan kejelasan prosedur masih memerlukan perbaikan. Kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan menunjukkan tekanan yang signifikan, di mana banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, penghasilan tidak mencukupi, serta hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa meskipun bantuan sosial memberikan dampak positif, efektivitasnya belum optimal dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Argareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. W. M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida*, 12(1), 101-110. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/30180>

- Mardiatillah, R., Panorama, M., & Maftukhatusolikhhah. (2021). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8825>
- Maria, W. N., Kirana, N. N., Ulpa, A., & Handayani, D. N. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)*, 8(2), 210-224. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i2.3805>
- Maria, W. N., Kirana, N. N., Ulpa, A., & Handayani, D. N. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)*, 8(2), 210-224. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i2.3805>
- Pemerintah Kota Denpasar. (2024). Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Denpasar 2024. Bappeda Kota Denpasar.
- Pemerintah Kota Denpasar. (2024). Profil Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2024
- Wijantari, N. M. W., & Bendesa, I. K. G. (2016). Kemiskinan di Provinsi Bali (Studi Komparatif Kabupaten/Kota di Provinsi Bali).